

***Stakeholder Analysis* Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu**

Afry Rakhmadany*

(PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu)

E-mail: afry.rakhmadany@gmail.com,

Muhammad Tahsinurridlo**

(Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga)

E-mail: muhammادتahsinurridlo@gmail.com,

Laili Fauziyah***

(Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga)

E-mail: lailifauziyah52@gmail.com,

Nova Arinda Rahmawati****

(Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga)

E-mail: nova.arinda.rahmawati@gmail.com,

Siti Aidah*****

(Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga)

E-mail: staidahmb1@gmail.com

Article History

Submitted: 22.04.2020; ***Revised:*** 14.06.2020; ***Accepted:*** 21.06.2020;

Abstract

According to regional division database in 2017, the percentage of poverty rates in Indonesia is 10.27% in urban areas and 16.31% in rural areas. Through Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Pertamina (the Company) Fuel Terminal Rewulu contributes to

accomplish sustainable economic development in Dusun Samben in order to improve the quality of life and the environment that benefits the company itself, the local community, and the wider community. In the process of CSR implementation, it is necessary to do social mapping in order to analyze potential stakeholders who can assist the programs. The objectives of this study is to conduct potential stakeholder to determine who will be involved in the program. The analytical method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and documentation. This study recommends some individuals and agencies that will potentially support the CSR program. The results showed that in the process of program planning requires stakeholder analysis in determining the actors involved in the program. The aim is to identify the interests, preferences, and the impact of the stakeholders on the program. With the result that in order to determine the right stakeholder to be involved, will build a massive foundation for the upcoming implementation of the program.

Keywords: *poverty, corporate social responsibility (CSR), stakeholders anlysis.*

Abstrak

Presentase angka kemiskinan di Indonesia menurut pembagian daerah pada tahun 2017 adalah 10,27 % di daerah perkotaan dan 16,31 % di daerah pedesaan. Melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewuluberkondtribusi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Dusun Samben guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Dalam proses pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan perlu melakukan pemetaan sosial guna menganalisa stakeholder yang bisa membantu dalam program program. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis stakeholder untuk menentukan aktor mana saja yang akan dilibatkan dalam program. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data berupa observasi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi individu dan instansi yang akan dilibatkan dalam program maupun berpotensi mendukung program. Kesimpulannya adalah dalam merencanakan sebuah program dibutuhkan

analisis stakeholder dalam menentukan aktor yang terlibat dalam program. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder terhadap program, sehingga dalam penentuan stakeholder yang terlibat dengan tepat akan membangun sebuah pondasi yang kuat untuk keberlangsungan program yang akan dilaksanakan.

Kata kunci: kemiskinan pedesaan, tanggungjawab sosial perusahaan, analisis stakeholder.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 presentase angka kemiskinan Indonesia di daerah perkotaan adalah 10,27% sedangkan di daerah pedesaan adalah 16,31 %¹. Penyelesaian masalah kemiskinan di daerah pedesaan masih menjadi tugas rumah bagi pemerintah. Penyebab mendasar kemiskinan yang terjadi di pedesaan diantaranya adalah perekonomian yang rendah, sumber daya yang rendah, prasarana atau infrastruktur, kemampuan/keterampilan yang terbatas, serta lokasi yang mungkin tidak menguntungkan².

Bentuk upaya pemerintah dalam mengurai permasalahan ini dapat dilihat pada saat munculnya perubahan kebijakan yang dulunya sentralistik menjadi desentralisasi. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang perluasan wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan ini bisa dibilang sangat revolusioner karena pemerintah pusat mendistribusikan kewenangan dan kekuasaan pemerintah pusat ke daerah-daerah³. Namun beberapa tokoh beranggapan kebijakan desentralisasi hanya menimbulkan

¹ Sarah Nita Hasibuan, Bambang Juanda, and Sri Mulatsih, 'Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7.2 (2019), pp. 79–91

² Muhtar And DKK, 'MASYARAKAT DESA TERTINGGAL: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo)', pp. 17–34.

³ Mudiwati Rahmatunnisa, 'Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Di Era Reformasi', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2.3 (2015), pp. 505-522.

raja-raja kecil baru di daerah⁴. Hal ini bertentangan dengan semangat awal penyusunan kebijakan tersebut sehingga kebijakan ini perlu dipertimbangkan kembali.

Angin segar keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pedesaan terus berhembus. Setiap tahunnya pemerintah selalu mengupayakan pemerataan pembangunan dengan memperbaiki Undang-Undang yang telah ada sebelumnya. Pada pilpres tahun 2014, Joko Widodo (Jokowi) menyapaikan keberpihakan terhadap pembangunan desa. Disampaikan melalui salah satu visi dan misi beliau yaitu ‘membangun Indonesia dari pinggiran’. Pembangunan tidak lagi terpusat pada wilayah perkotaan melainkan menyebar ke seluruh pelosok wilayah di Indonesia. Bahkan pembangunan pada setiap wilayah tidak harus sama persis sehingga dapat mengangkat karakteristik dan kemampuan dari setiap daerah⁵. Bentuk nyata realisasi dari visi tersebut adalah dengan terus meningkatkan anggaran APBN untuk pembangunan pedesaan. Tercatat pada tahun 2015 dana yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp. 20,67 triliun, tahun 2016 meningkat Rp. 46.96 triliun, tahun 2017 terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 60 triliun⁶.

Dana yang semakin bertambah setiap tahunnya tidak seketika merubah kondisi pedesaan menjadi baik. Masih banyak desa yang belum merasakan pembangunan. Dari data yang ada, pada tahun 2018 terdapat 14.461 desa tergolong desa tertinggal. Sebagai contoh di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara akses jalan masih sangat buruk karena

⁴ Kardin Simanjuntak, ‘Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia’, *Jurnal Bina Praja*, 07.02 (2015), pp. 111–130.

⁵ FitriHalimah, ‘Studi Deskriptif Penerapan Program Nawacita Presiden Jokowi Tentang Membangun Indonesia Dari Pinggiran Terhadap Kesejahteraan Warga di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo’, *Repository Universitas PGRI Yogyakarta*, 4.1 (2019), pp. 75–84

⁶ Koran sindo, ‘Pembangunan Desa Dalam 3 Tahun Jokowi Ini Hasilnya’, <https://economy.okezone.com/read/2017/10/19/320/1798339/pembangunan-desa-dalam-3-tahun-jokowi-ini-hasilnya>, 2020.

belum diaspal dan berlubang. Bukan hanya jalan, namun juga banyak desa yang belum di aliri listrik⁷.

Saat ini tanggung jawab mensejahterakan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Semua elemen yang ada di masyarakat memiliki andil dalam memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebagai contoh kontribusi swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini adalah perusahaan tertuang dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kebijakan membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TKJL) lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Undang-Undang ini mengamanatkan kepada perusahaan untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.

Keterlibatan swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dirasa cukup penting. Meskipun alokasi anggaran meningkat setiap tahunnya, tetapi perlu adanya analisis yang mendalam agar kontribusi perusahaan tidak salah sasaran⁸. Perencanaan sosial yang matang merupakan salah satu cara agar program dapat tepat sasaran⁹.

Perencanaan sosial merubah analisis yang dilakukan guna memetakan potensi dan masalah yang ada di masyarakat¹⁰. Salah satu pisau analisis yang dapat digunakan dalam pemetaan social adalah *stakeholder*

⁷ BPS, 'Hasil Pendataan Potensi Desa Podes 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>, 2020

⁸ Rahadiyand Aditya, 'Analisis Penta Helix Dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratura Pada Tahun 2017', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>>.

⁹ Oekan S Abdoellah and others, 'Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2019), 59 <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.24461>>.

¹⁰ Syahrani, 'Penyusunan Program Desa Berdasarkan Pemetaan Sosial (Social Mapping) Di Kecamatan Penajam-Kabupaten Paser Utara', *Jurnal Paradigma*, 5.3 (2016), pp. 160–82.

*analysis*¹¹. Mengetahui peta aktor di sebuah wilayah akan memudahkan pemerintah, swasta ataupun lembaga swadaya dalam menyusun program pemberdayaan yang tepat sasaran¹².

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu merupakan salah satu perusahaan yang beroperasi di Bantul, Yogyakarta tepatnya di Desa Argomulyo. Selain beroperasi di pedesaan juga memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari membaca keresahan yang diungkapkan petani mengenai tipisnya keuntungan yang mereka dapatkan dari hasil menjual gabah. Hal itu disebabkan oleh kebiasaan petani yang menjual gabahnya kepada tengkulak sehingga harus melewati rantai pengolahan dan pendistribusian yang panjang menyebabkan harga gabah menjadi rendah. PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu hadir membantu masyarakat petani dengan meluncurkan program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS). Dijalankan dengan kolaborasi antara PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu, Joglo Tani, dan Kelompok Tani Boga Lestari di Dusun Samben. Program JAPANGMAS memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya para petani serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan memutus rantai distribusi yang panjang menjadi lebih singkat sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Penelitian ini menganalisis stakeholder pada program JAPANGMAS, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan dalam menentukan aktor mana saja yang akan dilibatkan dalam menjalankan program.

Penelitian pertama ditulis oleh Afriska Yoga Saputri dengan judul Stakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur). Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan analisis *stakeholder* pemerintah mampu mengetahui aktor yang akan terlibat dalam

¹¹ Santoso Tri Raharjo and others, 'MEMETAKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN CSR PARTISIPATIF', *Share : Social Work Journal*, 9.1 (2019), 37 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.20576>>.

¹² Fitri Handayani and Hardi Warsono, 'Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang', *Journal of Public Policy and Management UNDIP*, 06 (2017), pp. 1–13.

program kemudian dapat saling menghubungkan antar kepentingan sehingga program berjalan dengan lancar¹³.

Penelitian kedua ditulis oleh Wahyu, Golar, dan Sudirman Dg. Massiri dengan judul Analisis Kepentingan Stakeholder dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Namo Kecamatan Kulawi. Hasil dari penelitian ini adalah kepentingan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat yaitu melakukan penguatan kapasitas masyarakat sesuai tupoksinya. Dari hasil analisa data mejelaskan bahwa harus terjalin kerjasama yang baik antara *key player* yang berkepentingan dalam masyarakat untuk memaksimalkan peran dari setiap *stakeholder* dan menjalankan tupoksi masing-masing guna kesuksesan program¹⁴.

Penelitian ketiga ditulis oleh Fitri Handayani dan Hardi Warsono dengan judul Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pengembangan objek wisata tersebut yang menjadi penghambat berkembangnya objek wisata ini adalah lahan, anggaran, sumberdaya manusia, pola pikir regulasi, promosi, dan kerjasama antar *stakeholder*. Lagi-lagi *stakeholder* memiliki pengaruh penting dalam keberhasilan program. Jika diusut kembali menjadi penting untuk membangun pola hubungan yang positif dan sebagai pondasi¹⁵.

Penelitian ini akan menghasilkan nama individu atau institusi sebagai rekomendasi bagi perusahaan untuk menentukan aktor mana saja yang akan dilibatkan dalam program. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang penilaian kinerja *stakeholder*.

¹³ Yoga Afriska Saputri, 'Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)', *Jurnal Of Politic and Government Studies*, 08.04 (2019), pp. 1–10.

¹⁴ Wahyu, Golar, dan Sudirman Dg. Massiri, 'Analisis Kepentingan *Stakeholder* Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi, *J. Forestsaint*, 16.02 (2019).

¹⁵ Fitri Handayani and Hardi Warsono, 'Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang', *Journal of Public Policy and Management UNDIP*, 06 (2017), pp. 1–13.

Stakeholder Analysis Pada Program Tanggung Jawab Perusahaan:

Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh ataupun dipengaruhi oleh program. Kesalahan dalam menentukan *stakeholder* yang terlibat biasanya menjadi salah satu alasan dari kegagalan sebuah program karena pondasi yang dibangun tidak kuat¹⁶. *stakeholder* menurut Gray adalah pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan baik sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Contohnya adalah masyarakat, karyawan pemerintah dan lain-lain¹⁷. Jadi dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* merupakan individu dan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan baik aktor yang terpengaruh ataupun mempengaruhi program.

Stakeholder analysis adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif dan sistematis untuk menentukan siapa yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan atau mengimplementasikan suatu aturan atau program¹⁸. *Stakeholder analysis* adalah teknik pengumpulan dan analisis sistematis serta informasi kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kepentingan aktor yang harus diperhitungkan dalam proyek¹⁹. Kesimpulannya *stakeholder analysis* merupakan proses mengumpulkan dan menganalisis data informasi secara kuantitatif dan kualitatif serta sistematis untuk menentukan aktor yang perlu dilibatkan dalam program.

Stakeholder analysis dilakukan dengan tiga tahap, yaitu a. identifikasi *stakeholder* menjadi *stakeholder* kunci, internal, dan eksternal, b. *stakeholder analysis* berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh

¹⁶ Raj K. Gupta and others, *Hand Book On Planning, Monitor And Evaluation For Development*, (USA: United Nation Development Program, 2009).

¹⁷ Ridwan Purnama and Sulastri, 'Analisis Model Kekuatan Stakeholder Dalam Desain Dan Implementasi Kebijakan UPI', *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 5.2 (2014), pp. 85–96.

¹⁸ Kammi Schmeer, 'Stakeholder Analysis Guidelines - Section 2', *Stakeholder Analysis Guidelines*, 15 (2000), pp. 338–45.

¹⁹ Hans Knoepfel and Ruedi Berger, *Project Cost Management., Proj Manage in Prog, Tools and Strategies for the 90s, Int Resour on the Appl of Ideas, Knowl and Exper Concern Proj and Proj*, (USA: Project Management Institute, 2013), p. 395.

terhadap program, c. mengolah data yang didapatkan²⁰. Setelah ketiga langkah tersebut dilaksanakan maka akan menghasilkan aktor yang bisa dilibatkan untuk mendukung jalannya program.

Identifikasi *stakeholder*

Identifikasi yang dilakukan memecah *stakeholder* menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok kunci adalah berhak mengambil keputusan, kelompok internal adalah kelompok yang individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung terhadap program dan yang terakhir kelompok eksternal atau kelompok yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap program tetapi memiliki kepedulian untuk membantu program.

Setiap *stakeholders* memiliki pengaruh dan kepentingan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu proses pemetaan sosial perlu dilakukan untuk mengetahui derajat *power* (pengaruh) dan *interest* (kepentingan) setiap aktor atau intansi.

Untuk mengetahui derajat pengaruh *stakeholder* terhadap program, peneliti membuat setidaknya ada enam indikator yang bisa menjelaskan. Pertama *stakeholder* memiliki kapital atau kekuatan dalam segi finansial dan material. Contoh memiliki tanah, bangunan ataupun uang. Kedua *stakeholder* memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang dasar-dasar pengembangan masyarakat. Ketiga *stakeholder* memiliki kekuatan secara politik atau menjadi tokoh penting yang diakui dalam masyarakat. Keempat *stakeholder* memiliki legitimasi sosial atau diakui secara sosial dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kelima *stakeholder* memiliki keterampilan/fasilitasi pengembangan masyarakat. keenam *stakeholder* memiliki jaringan atau koneksi yang luas baik didalam desa maupun diluar itu serasi dengan kepentingan pengembangan masyarakat yang dilakukan.

Selanjutnya untuk mengetahui derajat kepentingan *stakeholder* peneliti membuat empat indikator. Pertama *stakeholder* memberikan bantuan berupa tenaga fisik untuk kepentingan program. Kedua *stakeholder*

²⁰ Resources Field, Retno Kusumastuti, and Julian Ambassador Shiddiq, 'Gender Bidang ESDM Stakeholder Analysis in Design of Gender-Responsive Human Resources Development Program in Energy and Mineral', Geominerba, 03.01, September, (2018), pp. 4-5.

telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mendukung program. Ketiga *stakeholder* telah memberikan bantuan kapital berupa material dan finansial untuk kelancaran program. Keempat *stakeholder* memberi bantuan berupa pikirannya untuk membantu program. *Stakeholder* mendapat nilai satu dalam setiap indikator jika dirasa memenuhi syarat dan nilai nol jika tidak memenuhi. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan peneliti. Penentuan posisi *stakeholder* mengenai tingkat kepentingan dan pengaruh ditentukan dengan ketentuan berdasarkan tabel 1.

Gambar 1. Tabel Derajat Pengaruh dan Kepentingan

No.	Kriteria	Skor
Power		
1.	Low Power	0-3
2.	High Power	4-6
Interest		
1.	Low Interest	0-2
2.	High Interest	3-4

Sumber: Hasil Refleksi Peneliti

Kasifikasi *Stakeholder*

Ada beberapa alat untuk menklasifikasikan *stakeholder* seperti *basic stakeholder analysis technique*, *power versus interest grids*, *stakeholder influence diagrams*, dan *participation planning matrix interventions*. Dalam penelitian ini alat klasifikasi *stakeholder* yang digunakan adalah dengan metode *power versus interest grids*, yaitu menklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder* menjadi empat bagian *player*, *subjects*, *crowd*, dan *context setter* seperti gambar 2²¹.

Gambar 2. Grafik Power Versus Interest Grid

²¹ John Bryson, and Hubert Humphrey, 'What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques', 2004.

INTEREST	HIGH	SUBJECTS	PLAYERS
	LOW	CROWD	CONTEXT SETTER
		LOW	HIGH
		POWER	

Stakeholders yang telah dianalisis dan diketahui posisinya bisa menjadi rekomendasi bagi perencanaan program agar dapat dilibatkan dan ditentukan strategi partisipasinya dalam desain program yang dibuat. Tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi *stakeholder* dan mengelompokkan adalah melakukan klasifikasi *stakeholder* kedalam empat bagian. Pertama *Players* adalah *stakeholder* kunci yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi baik secara politik maupun sosial. Kedua, adalah *Subjects* terdiri dari *stakeholder* yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Ketiga, *Crowds* adalah *stakeholder* yang memiliki pengaruh yang rendah baik secara politik maupun sosial dan memiliki kepentingan yang rendah. Keempat, *Context Setter* terdiri dari *stakeholder* yang memiliki kekuatan yang tinggi baik secara politik ataupun sosialnya tetapi memiliki kepentingan yang rendah.²²

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Samben, Argomulyo, Sedayu, Bantul, D. I. Yogyakarta. Waktu penelitian dan pengambilan data berlangsung selama satu bulan pada bulan oktober tahun 2019. Objek dari penelitian ini adalah program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) oleh PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu. Subjek dari penelitian ini adalah perwakilan perusahaan dalam program JAPANGMA yaitu Zukhruf (CDO program JAPANGMAS), Jakiman (Ketua Kelompok Tani Boga Lestari dan JAPANGMAS), Arif (kepala dusun Samben). Kemudian beberapa perwakilan warga dari setiap RT. penelitian ini merupakan jenis

²² Resources Field, Retno Kusumastuti, and Julian Ambassador Shiddiq, 'gender Bidang ESDM Stakeholder Analysis in Design of Human Resources Development Program in Energy ang Mineral', *Geominerba*, 03.01, (2018).

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Instrumen penelitian ada peneliti sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan. Observasi untuk melakukan pengamatan dan wawancara kami lakukan pada saat jam istirahat siang.

Dalam penelitian ini sampel dipilih secara sengaja atau *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan rekomendasi dari kepala dukuh. Pertimbangannya adalah sampel yang dipilih yakni sumber data dianggap paling tahu dan terlibat langsung dalam program sesuai apa yang diharapkan sehingga membantu mempermudah penelitian. Pertama kami melakukan wawancara dengan Zukhruf karena beliau merupakan CDO utusan perusahaan untuk program JAPANGMAS sehingga dia dianggap orang yang paling tahu mengenai program JAPANGMAS. Selanjutnya kami mewawancarai Jakiman yang menjabat sebagai ketua Kelompok Tani Boga Lestari sekaligus ketua dari JAPANGMAS. Lalu kami mewawancarai Arif selaku kepala dukuh untuk mencari informasi mengenai keadaan sosial masyarakat di Dusun Samben, dari informasi kepala dukuh kami mulai menentukan sample wawancara yang telah direkomendasikan oleh kepala dukuh disetiap RT nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) didirikan tanggal 10 Mei 2018. Program tersebut berada di bawah pengamatan dan pembinaan fungsi CSR PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu dan merupakan program yang bertujuan memandirikan masyarakat berbasis *agribisnis*. CSR PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu mencoba membantu mewujudkan mimpi pemerintah Indonesia dalam menciptakan ketahanan pangan. Dengan program yang dikonsepskan perusahaan yaitu program JAPANGMAS perusahaan berharap dapat membangun kemandirian petani dengan produksi beras secara mandiri untuk menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan. Selain bertujuan untuk memutus rantai distribusi yang selama ini dikuasai oleh tengkulak

yang merugikan petani. Hal tersebut juga membantu meningkatkan keuntungan yang selama ini diraup oleh tengkulak kini bisa dinikmati sepenuhnya oleh petani.

Stakeholder Analysis Program JAPANGMAS

Identifikasi yang dilakukan mengelompokkan stakeholder menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok kunci adalah berhak mengambil keputusan, kelompok internal adalah kelompok yang individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan langsung terhadap program dan yang terakhir kelompok eksternal adalah kelompok yang tidak memiliki keterkaitan langsung terhadap program tetapi memiliki kepedulian untuk membantu program disajikan pada gambar 3.

Gambar 3. Tabel Identifikasi Stakeholder

<u>kelompok</u>	<u>Individu/institusi</u>	<u>Peran</u>	<u>Kepentingan</u>
<u>Kunci</u>	CSR PTPertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu	Fasilitator / pendamping dalam program pemberdayaan masyarakat	Melakukan program pemberdayaan masyarakat
	Pemerintah dusun <u>Samben</u>	Sebagai stakeholder dan pendukung dalam program pemberdayaan masyarakat	Memberi informasi tentang kebutuhan masyarakat
<u>Internal</u>	Lembaga Permasyarakatan Masyarakat Desa (LPMD)	Menampung aspirasi dari masyarakat, kendala-kendala, dan musyawarah perkembangan dusun.	Sebagai wadah penyusunan program pemberdayaan
	Kelompok wanita tani	Sebagai pelaksana program pemberdayaan	Memberikan bantuan tenaga dan waktu untuk pelaksanaan program
	Kelompok tani boga lestari	Sebagai pelaksana program pemberdayaan	Memberikan bantuan tenaga dan waktu untuk pelaksanaan program
	Karang taruna	Sebagai pelaksana program pemberdayaan	Menjadi pendorong keberhasilan program
<u>eksternal</u>	Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Pembina, pemantau, dan mengevaluasi kinerja program	Melakukan pemberdayaan Kelompok Tani Boga Lestari

Sumber: Data primer diolah, 2019

Pengaruh (power) Stakeholder Terhadap Program JAPANGMAS

Pengukuran tingkat pengaruh *stakeholder* dalam program JAPANGMAS menggunakan indikator yang telah dibuat oleh peneliti. Terdapat enam indikator diantaranya; memiliki kapital, pengetahuan atau kompetensi pengembangan masyarakat, legitimasi politik, legitimasi

sosial, keterampilan atau fasilitasi pengembangan kapasitas serta memiliki jaringan. Hasil perhitungan tingkat pengaruh masing-masing *stakeholder* dengan menggunakan penilaian berdasar indikator diatas yang disajikan pada gambar 4.

Gambar 4. Tabel Penilaian Power Grid

No.	Individu/institusi	Indikator Power					Nilai
		Memiliki kapital	Memiliki pengetahuan/kompetensi pengembangan masyarakat	Memiliki legitimasi politik	Memiliki legitimasi sosial	Memiliki keterampilan/ fasilitasi pengembangan	
1.	Kepala Dusun Arif	1	1	1	1	1	6
2.	Jakiman	1	1	0	1	1	5
3.	Jainah	1	0	0	1	0	3
4.	Andi	1	1	1	1	1	6
5.	Naryati	1	1	0	1	1	4
6.	Harwiyah	1	1	0	1	1	4
7.	Marsudi	1	1	1	1	1	6
8.	Siti Julaeaha	1	0	0	1	1	4
9.	Murdiman	1	1	1	1	1	6
10.	Pak RT 5	0	0	1	1	0	3
11.	Mr. J	0	1	0	1	0	2
12.	Annisa	1	1	0	1	0	3
13.	Siti Nurhalifah	1	1	0	1	0	3
14.	Yatini	0	1	0	1	0	2
15.	Jaiman	0	1	0	1	1	4
16.	Bejo	0	0	0	1	0	1
17.	Cempluk	1	0	0	1	0	3
18.	Saminem	1	0	0	1	1	4
19.	Wahudi	1	0	0	0	1	3
20.	Waluyo	0	0	0	1	0	1
21.	Temon	1	0	0	1	0	3
22.	Tri Purwoko	1	1	0	1	0	3
23.	Pono	1	1	1	1	1	6
24.	Parni	1	1	1	1	1	6
25.	Zukhruf	0	1	1	1	1	5
26.	CSR Pertamina	1	1	0	1	1	5
27.	Boga Lestari	1	1	0	1	1	5
28.	KWVT	1	0	0	1	1	4
29.	LPMD	1	1	1	1	1	6
30.	Karang Taruna	0	1	0	1	0	3
31.	Dinas Pertanian	1	1	0	0	1	4

Sumber: Data primer diolah, 2019

Kepentingan (*Interest*) *Stakeholder* terhadap Program JAPANGMAS

Pengukuran tingkat kepentingan *stakeholder* di Dusun Samben program JAPANGMAS menggunakan empat indikator yang dibuat oleh peneliti diantaranya; memberi bantuan tenaga atau SDM, meluangkan waktu, memberikan bantuan kapital dan memberikan bantuan pikiran. Hasil perhitungan tingkat kepentingan masing-masing *stakeholder* pada gambar 5.

Gambar 5. Tabel Penilaian Interest

No.	Stakeholder	Membe ri Bantuan Tenaga/ SDM	Indikator Interest					Nilai
			Memiliki pengetah uan/kom pentensi pengemb angan masyarak at	Memiliki legistima si politik	Memiliki legistima si sosial	Memiliki keteramp ilan/ fasilitasi pengemb angan	Memiliki jaringan	
1.	Dukuh Arif	1	1	1	1	1	1	6
2.	Jakiman	1	1	0	1	1	1	5
3.	Jainah	0	0	0	1	0	1	3
4.	Andi	0	1	1	1	1	1	6
5.	Naryati	1	1	0	1	1	0	4
6.	Harwiyah	1	1	0	1	1	0	4
7.	Marsudi	1	1	1	1	1	1	6
8.	Siti Julaeha	1	0	0	1	1	1	4
9.	Murdiman	1	1	1	1	1	1	6
10.	Pak Rt 5	1	0	1	1	0	1	3
11.	Mr. J	0	1	0	1	0	0	2
12.	Annisia	1	1	0	1	0	0	3
13.	Siti Nurhalifah	1	1	0	1	0	0	3
14.	Yatini	1	1	0	1	0	0	2
15.	Jaiman	1	1	0	1	1	1	4
16.	Bejo	0	0	0	1	0	0	1
17.	Cempluk	0	0	0	1	0	1	3
18.	Saminem	1	0	0	1	1	1	4
19.	Wahudi	0	0	0	0	1	1	3
20.	Waluyo	0	0	0	1	0	0	1
21.	Temoni	1	0	0	1	0	1	3
22.	Tri Purwoko	1	1	0	1	0	0	3
23.	Pono	0	1	1	1	1	1	6
24.	Parni	0	1	1	1	1	1	6
25.	Zukhruf	1	1	1	1	1	1	5
26.	CSR Pertamina	1	1	0	1	1	1	5
27.	Boga Lestari	1	1	0	1	1	1	5
28.	KWT	1	0	0	1	1	1	4
29.	LPMD	0	1	1	1	1	1	6
30.	Karang Taruna	0	1	0	1	0	1	3
31.	Dinas Pertanian	0	1	0	0	1	1	4

Sumber: Data primer diolah, 2019

Klasifikasi Stakeholder

Dalam metode klasifikasi *stakeholder Power versus Interest Grid* akan memilah *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap program. Hasilnya adalah *stakeholder* yang akan dilibatkan dalam program JAPANGMAS dan rekomendasi *stakeholder* yang berpotensi dapat mendukung program JAPANGMAS. Hasil dari klasifikasi *stakeholder* pada penelitian ini disajikan pada gambar 6.

Gambar 6. Grafik Power Versus Interest

INTEREST	POWER	SUBJECTS	PLAYERS
		LOW	HIGH
INTEREST	HIGH	Individu Pak RT. 5 <u>Yatini (pemilik lahan)</u> , <u>Siti Nurhalifah (pemilik lahan)</u>	Instansi <u>CSR Pertamina</u> <u>Kelompok Tani Boga Lestari</u> <u>Dinas Pertanian DIY</u> Individu <u>Arif (kepala dusun)</u> <u>Jakiman</u> <u>Nuryati (pengurus KWT), Harwiyah (bendahara Japangmas), Murdiman (RT.02),</u> <u>Jaiman (penggarap lahan),</u> <u>Zukhruf (CDO).</u>
	LOW	CROWD Instansi <u>Karang Taruna</u> Individu <u>Mr. J (warga)</u> <u>Tri Purwoke (pemilik lahan)</u> <u>Bu bejo (RT. 01)</u> <u>Cempluk</u> <u>Waluyo (penggarap RT. 02)</u> <u>Temon</u> <u>Wahudi (pemilik lahan)</u> <u>Annisa (pemilik lahan)</u> <u>Jainah (RT. 01)</u>	CONTEXT SETTER Instansi <u>Kelompok Wanita Tani (KWT)</u> <u>LPMD</u> Individu <u>Andi (RT. 03)</u> <u>Marsudi (ketua RT. 02)</u> <u>Saminem (pemilik lahan)</u> <u>Fono (pemilik lahan)</u> <u>Parmi (pemilik lahan)</u> <u>Julaikha</u>

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Subjects (Low Power, High Interest)

Kuadran C (*Low Power, High Interest*) terdiri dari individu atau instansi yang memiliki kekuatan rendah baik pada posisi sosial maupun politiknya akan tetapi memiliki kepentingan yang tinggi pada program pemberdayaan masyarakat. Individu atau instansi yang termasuk kedalamnya adalah Ketua RT. 5, Yatini, Siti Nurhalifah.

Players (High Power, High Interest)

Kuadran B (*High Power, High Interest*) termasuk kedalam individu atau instansi yang memiliki kekuatan yang tinggi baik dari posisi sosial maupun politiknya dan juga memiliki kepentingan yang tinggi bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Individu dan instansi yang termasuk

kedalamnya adalah CSR PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu, Kelompok Tani Boga Lestari, Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Arif (kepala dusun), Jakiman, Nuryati, Harwiyah, Murdiman, Jaiman, Zuhurf (CDO).

Crowd (*Low Power, Low Interest*)

Kuadran D (*Low Power, Low Interest*) Kelompok ini terdiri dari aktor yang memiliki kekuatan rendah baik dari segi politik maupun sosial dan juga memiliki kepentingan yang rendah terhadap program pemberdayaan masyarakat. Individu atau kelompok yang termasuk kedalamnya adalah Karang Taruna dusun Samben, Mr. J (warga), Tri Purwoko, Bejo, Cempluk, Waluyo, Bu Temon, Wahudi, Annisa, Jainah.

Context Setter (*high Power, Low Interest*)

Kuadran A (*high Power, Low Interest*) adalah individu atau instansi yang memiliki kekuatan yang tinggi dari segi posisi sosial maupun politiknya di masyarakat. Namun memiliki *interest* (kepentingan) yang rendah. Individu atau instansi yang termasuk didalamnya adalah Kelompok Wanita Tani, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), Andi, Marsudi (ketua RT.02), Saminem, Pono, Parmi, Julaikha.

Rekomendasi *Stakeholder* Pada Program JAPANGMAS :

Individu dan Institusi Pendukung Program

PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu merupakan perusahaan yang beroperasi di Bantul, Yogyakarta. Perusahaan mendukung petani dusun Samben untuk mengelola dan mendistribusikan gabah secara mandiri agar petani menikmati hasil yang lebih banyak dibandingkan dengan melibatkan tengkulak. Melalui CSR, perusahaan mengirim perwakilan perusahaan *Community Development Officer* (CDO) yaitu Zukhruf untuk merealisasikannya dalam program Jaminan pangan masyarakat (JAPANGMAS).

“Para petani bisa menikmati harga gabah sesuai harga pasar bahkan lebih tinggi 10 persen. Padahal, biasanya harga gabah jatuh saat panen raya tiba, akibat ulah tengkulak yang menekan harga gabah serendah mungkin.

Sementara harga jual beras, karena terpotongnya mata rantai tengkulak, juga menjadi lebih murah hingga 13 persen,” imbuh Rahmad²³.

Selanjutnya Jakiman ketua Kelompok Tani Boga Lestari sekaligus ketua Kelompok JAPANGMAS. Beliau sangat mendukung program ini karena tujuannya memberdayakan masyarakat petani dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan pokok. *“saya menjadi Ketua JAPANGMAS senang karena tujuan dari Program JAPANGMAS ini memberdayakan masyarakat dan menyerap tenaga kerja”²⁴.*

Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu menjadikan Dusun Samben sebagai wilayah daulat beras. Bantuan yang diberikan kepada Kelompok Tani Boga Lestari adalah tempat penjemuran benih dirumah produksi beras Kelompok Tani Boga Lestari.

Sambutan hangat diberikan Kepala Dusun Samben yaitu Arif untuk program JAPANGMAS. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan terlihat beliau selalu dengan senang hati menyumbangkan waktu dan tenaga serta suaranya untuk membantu kelancaran program JAPANGMAS. Dari beliau peneliti mendapatkan rekomendasi nama-nama warga Dusun Samben untuk diwawancarai. Antara lain adalah Sunaryati merupakan petani di Dusun Samben. Sunaryati merupakan pengurus dari Kelompok Wanita Tani (KWT) dan sekaligus sekretaris Japangmas. Menurut Sunaryati kehadiran JAPANGMAS sangat membantu masyarakat Dusun Samben. Utamanya dalam pemenuhan kebutuhan pokok kini tidak lagi mahal karena beras yang dijual Japangmas lebih terjangkau. *“Oh itu bagus mas buat masyarakat, masyarakat juga menyambut dengan gembira. Kan dengan ini memudahkan masyarakat yabg membeli beras supaya lebih murah daripada diwarung harganya 12ribu nah kalo di JAPANGMAS dapet harga 9 ribu.”²⁵.* Selanjutnya Jaiman merupakan penggarap sawah di Dusun

²³ Jogja Tribun News, ‘Japangmas Sejahterakan Petani Bantul’ <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/10/japangmas-sejahterakan-petani-bantul>, 2019.

²⁴ Wawancara dengan Jakiman (ketua JAPANGMAS) tanggal 10 oktober 2019, di rumah Jakiman.

²⁵ Wawancara dengan Sunaryati (Anggota KWT, Sekertaris JAPANGMAS), tanggal 13 oktober 2019, di rumah Sunaryati.

Samben. Hasil panen Jaiman dijual ke JAPANGMAS karena lebih menguntungkan. Kemudahan yang didapatkannya adalah dapat membeli benih dengan harga yang lebih murah dari pada beli diluar JAPANGMAS.

“ya itu mbak benih kalo beli diluar itu mahal kalo beli di japngmas itu harganya lebih murah sama kalo pupuk sih belum ya dan juga obat-obatan itu ditanggung saama kelompok tani jadi kalo menanam padi itu bareng-bareng pengairan juga bareng jadi panen itu bareng semua ya ini mau diambil semua”²⁶.

Individu dan Institusi Potensial Pendukung

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan kelompok wanita tani sangat berpotensi untuk mendukung program dengan masalah yang sama yaitu pendistribusian gabah hasil panen yang seringkali dikuasai oleh tengkulak. Tentu saja kelompok ini sangat tertarik untuk mengikuti program.

Selanjutnya Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, berdasarkan pengamatan dilapangan sangat memungkinkan jika LPMD ini menjadi pendukung dari program JAPANGMAS, karena pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat sebenarnya merupakan kepentingan bersama. Jika ada solusi dari kekurangan yang ada pasti sangat didukung upaya yang dilakukan. Bahkan ketua dari Lembaga Permusyawaratan Desa turut mendukung adanya program JAPANGMAS. Dalam perkumpulan yang dilakukan LPMD beliau menyampaikan apresiasinya kepada program JAPANGMAS yang melakukan pengelolaan gabah secara mandiri sehingga menambah penghasilan petani. *“Bagusnya program ini menolong petani memproduksi gabah biar dapet untung dari pada kita jualkan ke tengkulak”²⁷.*

Pemuda Dusun Samben yang tergabung kedalam Karang Taruna memiliki potensi untuk mendukung Program JAPANGMAS. Seperti yang disampaikan oleh Arif selaku Kepala Dusun Samben *“ya mau lah mas, kalo tujuannya memajukan desa mereka pasti mau. kemaren juga anak-anak mau bikin*

²⁶ Wawancara dengan Jaiman (penggarap sawah), tanggal 13 oktober 2019, di rumah Jaiman

²⁷ Penyampaian ketua LPMD (dalam rapat LPMD), tanggal 19 oktober, di rumah ketua RT. 01

web, tapi isinya gak menyeluruh dulu sih mas, boleh mas gapapa besok sama-sama anak-anak kita bikin branding keluar sana”²⁸.

Beliau mengatakan bahwa anak-anak muda akan antusias sekali pembangunan desa. Mereka akan senang bisa berkontribusi dalam program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan desa.

Beberapa warga juga menurut kami akan berpotensi mendukung program JAPANGMAS. salahsatunya Marsudi merupakan ketua dari RT. 04 beliau berprofesi sebagai buruh pabrik tetapi juga memiliki sawah. Gabah hasil sawah pak Marsudi biasanya digiling di JAPANGMAS. Marsudi merupakan anggota aktif dari Kelompok Tani Boga Lestari. Beliau berpotensi mendukung program dengan otoritasnya sebagai ketua RT.04 mungkin bisa membantu kelancaran program yang dilaksanakan.

SIMPULAN

Analisis *stakeholder* sebagai alat yang efektif bagi tim perencana program untuk mengidentifikasi dan memetakan kepentingan serta pengaruh masing-masing *stakeholder* sebelum mendesain sebuah program. Posisi masing-masing *stakeholder* menjadi rekomendasi bagi tim perencana program untuk merumuskan strategi yang optimal untuk melibatkan stakeholder tersebut. Jadi hasil ini menjadi modal awal untuk mendesain program.

Stakeholder mendukung Program Jaminan Pangan Masyarakat (JAPANGMAS) terdiri dari PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Rewulu, Kelompok Tani Boga Lestari, Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta, Zukhruf (CDO) Jakiman (Ketua Kelompok Tani Boga Lestari dan Ketua JAPANGMAS) Nuryati (Sekertaris JAPANGMAS dan anggota KWT Boga Lestari), Arif (Kepala Dusun), Jaiman.

Terakhir individu dan institusi potensial pendukung program JAPANGMAS yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Marsudi.

²⁸ Wawancara dengan Arif (Kepala Dukuh Samben), tanggal 10 oktober 2019, di rumah Arif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S, Sunardi Sunardi, Ida Widianingsih, and Martha Fani Cahyandito, 'Pemetaan Sosial Dalam Perencanaan Program Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan Citarum Hulu', *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2019), 59 <<https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i1.24461>>
- Aditya, Rahadiyand, 'Analisis Penta Helix Dalam Melihat Keberlanjutan Program CSR Patratuta Pada Tahun 2017', *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.2 (2019), 149 <<https://doi.org/10.24235/empower.v4i2.5320>>
- Afriska, Yoga Saputri, 'Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)', *Jurnal Of Politic and Government Studies*, 08.04 (2019).
- BPS, 'Hasil Pendataan Potensi Desa Podes' , 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>, [accessed 09 April 2020].
- Field, Resources, Retno Kusumastuti, and Julian Ambassador Shiddiq, 'GENDER BIDANG ESDM Stakeholder Analysis in Design of Gender-Responsive Human Resources Development Program in Energy and Mineral', September, 2018
- Halimah Fitri, 'Studi Deskriptif Penerapan Program Nawacita Presiden Jokowi Tentang Membangun Indonesia Dari Pinggiran Terhadap Kesejahteraan Warga di Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo', *Repository Universitas PGRI Yogyakarta*, 4.1 (2019).
- Handayani, Fitri, and Hardi Warsono, 'Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang', *Journal of Public Policy and Management UNDIP*, 06 (2017).
- Hans Knoepfel and Ruedi Berger, *A Guide To The Project Management Body Of Knowledge: PMBOK Guide-Fifth Edition*, (USA : Project Management Institute, 2013).
- Hasibuan, Sarah Nita, Bambang Juanda, and Sri Mulatsih, 'Analisis Sebaran Dan Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 7.2 (2019), 79–91 <<https://doi.org/10.29244/jai.2019.7.2.79-91>>

- Jogja Tribun News, 'Japangmas Sejahterakan Petani Bantul' <https://jogja.tribunnews.com/2019/10/10/japangmas-sejahterakan-petani-bantul>, 2019. [accessed 12 April 2020].
- John, Prof, John Bryson, and Hubert Humphrey, 'What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques', 2004
- Koran sindo, 'Pembangunan Desa Dalam 3 Tahun Jokowi Ini Hasilnya', <https://economy.okezone.com/read/2017/10/19/320/1798339/pembangunan-desa-dalam-3-tahun-jokowi-ini-hasilnya>, 2020. [accessed 04 April 2020].
- Knoepfel, Hans, and Ruedi Berger, *Project Cost Management., Proj Manage in Prog, Tools and Strategies for the 90s, Int Resour on the Appl of Ideas, Knowl and Exper Concern Proj and Proj* <<https://doi.org/10.14445/23488352/ijce-v4i11p101>>
- Muhtar And DKK, 'MASYARAKAT DESA TERTINGGAL: Kebutuhan, Permasalahan, Aset, dan Konsep Model Pemberdayaannya (Studi di Desa Jambu, Engkangin, Sendangmulyo & Mlatirejo)'.:.
- Purnama, Ridwan, and Sulastri, 'Analisis Model Kekuatan Stakeholder Dalam Desain Dan Implementasi Kebijakan UPI', *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 5.2 (2014).
- Raharjo, Santoso Tri, Sahadi Humaedi, Budhi Wibhawa, and Nurliana Cipta Apsari, 'MEMETAKAN TOKOH MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN CSR PARTISIPATIF', *Share : Social Work Journal*, 9.1 (2019), 37 <<https://doi.org/10.24198/share.v9i1.20576>>
- Rahmatunnisa, Mudiyati, 'Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Di Era Reformasi', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2.3 (2015), 505–22 <<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>>
- Schmeer, Kammi, 'Stakeholder Analysis Guidelines - Section 2', *Stakeholder Analysis Guidelines*, 15 (2000), 338–45 <<https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.338>>
- Simanjuntak, Kardin, 'Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia', *Jurnal Bina Praja*, 07.02 (2015), 111–30 <<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>>
- Syahrani, 'Penyusunan Program Desa Berdasarkan Pemetaan Sosial (Social Mapping) Di Kecamatan Penajam-Kabupaten Paser Utara', *Jurnal Paradigma*, 5.3 (2016).
- Wahyu, Golar, dan Sudirman Dg. Massiri, 'Analisis Kepentingan Stakeholder

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi, *J. Forestsaint*, 16.02 (2019).

United Nations Development Programme, *Handbook On Planning, Monitor and Evaluation For Development*, (USA: United Nations Development Programme, 2009).

Wawancara

Penyampaian ketua LPMD (dalam rapat LPMD), tanggal 19 oktober, di rumah ketua RT. 01

Wawancara dengan Sunaryati (Anggota KWT, Sekertaris JAPANGMAS), tanggal 13 oktober 2019, di rumah Sunaryati.

Wawancara dengan Arif (kepala Dukuh), tanggal 13 oktober 2019, di rumah Arif.

Wawancara dengan Jaiman (penggarap sawah), tanggal 13 oktober 2019, di rumah Jaiman.

Wawancara dengan Jakiman (ketua JAPANGMAS), tanggal 10 oktober 2019, di rumah Jakiman.